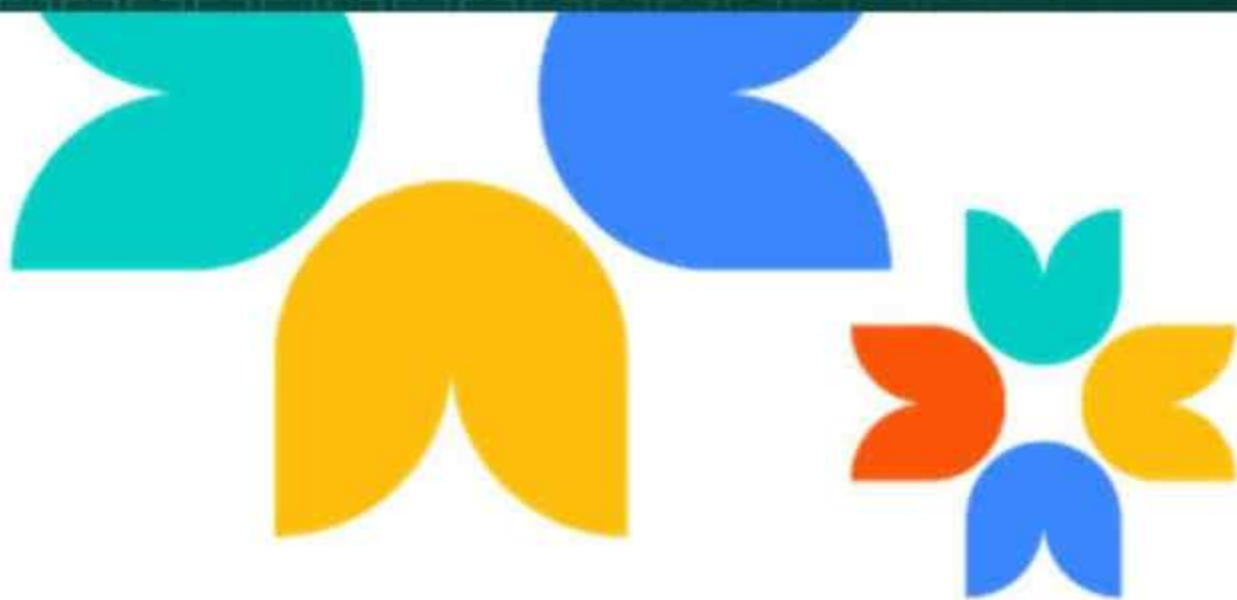


# RESPON PELAKU USAHA DALAM PENERIMAAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL



Wahyudin Darmalaksana  
Teti Ratnasih

**RESPON PELAKU USAHA DALAM PENERIMAAN  
KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL**

ISBN

Penulis: Wahyudin Darmalaksana dan Teti Ratnasih

Penerbit:

Sentra Publikasi Indonesia

Alamat Redaksi:

Jl. AH. Nasution No. 105 Gg. Swadaya No. 35 Bandung

Email:

Cetakan Pertama, Januari 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puja dan Puji serta syukur sudah sepatutnya dipanjatkan kepada kehadirat Allah Swt., karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Salawat serta salam juga senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Buku ini ditulis berdasarkan hasil studi dan penelitian lapangan. Hasil studi yang dilakukan terkait penerimaan pelaku UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal ini menghasilkan beberapa kesimpulan. *Pertama*, hasil wawancara dan suvey yang dilakukan menunjukkan bahwa para pelaku usaha secara umum bisa menerima kebijakan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan sertifikasi halal dianggap sebagai kebijakan yang positif dan dibutuhkan untuk membangun kesadaran halal serta ekosistem halal dalam dunia usaha. Meski demikian terdapat beberapa catatan dan kritikan terkait pengetahuan dan informasi halal yang masih rendah di kalangan pelaku usaha, persepsi tentang halal yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan dalam ajaran Islam, keraguan terkait efisiensi, efektivitas, manfaat, dan ekuitas kebijakan sertifikasi halal, serta kepuasan dan kesanggupan para pelaku usaha dalam menjalankan kebijakan sertifikasi halal tersebut.

*Kedua*, berdasarkan karakteristiknya, responden studi dengan tingkat usia, pendidikan, latar belakang keagamaan, dan bidang usaha yang beragam, masih memiliki keraguan terkait beberapa item yang diajukan kepada mereka sebagai indikator penerimaan kebijakan sertifikasi halal. Beberapa item dengan respon keraguan yang besar adalah item-item dari indikator *perilaku keagamaan, pengetahuan dan informasi halal, tujau personal dan kolektif, efisiensi, efektivitas, manfaat, penggunaan, kepuasan, ekuitas, dan kesanggupan*. *Ketiga*, pertimbangan pelaku usaha yang menjadi responden penelitian dalam penerimaan kebijakan sertifikasi halal tidak semata didasarkan pada pertimbangan teologis-keagamaan, tapi juga pada pertimbangan pragmatis usaha yang dijalankan. Dalam hal ini, berdasarkan uji CFA yang dilakukan, pengujian atas penerimaan kebijakan sertifikasi halal yang diukur dengan 14 indikator, sudah memenuhi kriteria kelayakan model studi yang baik, di mana indikator kesadaran halal dan anggapan efektivitas kebijakan, merupakan indikator dengan *loading factor* terbesar dalam model tersebut. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa indikator-indikator sistem (efisiensi, efektivitas, manfaat, penggunaan,

kepuasan, ekuitas, dan kesanggupan) lebih memberikan kontribusi pada pertimbangan pelaku usaha untuk menerima kebijakan sertifikasi halal tersebut.

Hasil studi ini dapat menjadi gambaran bagaimana penerimaan kebijakan sertifikasi halal berdasarkan respon para pelaku usaha. Secara umum, studi ini memiliki implikasi berikut: *Pertama*, penerapan kebijakan sertifikasi halal oleh pemerintah harus mempertimbangkan berbagai indikator penerimaan kebijakan tersebut, khususnya dari para pelaku usaha yang menjadi subjek pelaksana kebijakan, seperti pengetahuan tentang halal dan informasi kebijakan, kesadaran halal di kalangan pelaku usaha, persepsi pelaku usaha tentang halal, efisiensi, efektivitas, hingga kesanggupan pelaku usaha dalam menjalankannya. *Kedua*, penerapan kebijakan sertifikasi halal juga harus mempertimbangkan karakteristik pelaku usaha yang tidak homogen, baik yang dipengaruhi oleh usia, pendidikan, latar belakang keagamaan, maupun bidang usaha yang dijalankan. *Ketiga*, kebijakan sertifikasi harus memberikan perhatian pada dua indikator penting, yakni *kesadaran halal* dan *efektivitas* pelaksanaan kebijakan itu sendiri, yang diperkuat juga dengan indikator-indikator lainnya.

Studi ini memiliki sejumlah keterbatasan tertentu, di antaranya: *Pertama*, Topik dan variabel yang diteliti terfokus pada dimensi-dimensi penerimaan kebijakan sertifikasi halal. Variabel ini akan lebih komprehensif jika disandingkan dengan variabel lain, baik dalam studi korelasional ataupun implikatif; *Kedua*, model pengukuran yang digunakan dimodifikasi dari model penerimaan kebijakan yang berfokus pada aspek normatif dan sistemik dari kebijakan tanpa melibatkan pertimbangan nilai-nilai teologis spesifik dari kebijakan sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan model yang lebih sesuai untuk pengukuran penerimaan kebijakan sertifikasi halal tersebut. Berdasarkan pada keterbatasan tersebut, maka peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan riset terkait kebijakan sertifikasi halal ini dalam kerangka keterhubungan antar variabel yang lebih kompleks, ataupun berfokus pada perumusan model penerimaan kebijakan keagamaan yang memasukkan indikator-indikator teologis tertentu dalam pengukurannya.

Penelitian ini dibiayai oleh UTN Sunan Gunung Djati Bandung dalam kegiatan Litapdimas yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Tahun 2022. Topik penelitian ini semula berjudul Respon Pengusaha Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Bandung. Namun atas saran penelaah dan untuk kepentingan penerbitan diubah

menjadi Respon Pelaku Usaha dalam Penerimaan Kebijakan Sertifikasi Halal.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulisan sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memotivasi dalam pelaksanaan penelitian. Juga penulis ucapkan terimakasih untuk segenap handai taulan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhirnya, hanya kepada Allah Swt. penulis serahkan segala kebaikan semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya buku ini semoga menjadi amal jariyah berupa pahala di sisi Allah Swt. Tidak ada gading yang tak retak, penulis mengakui masih banyak kekurangan dan keterbatasan buku ini sehingga kiranya pembaca dapat memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan.

Bandung, Januari 2023  
Penulis

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	iv
PENDAHULUAN.....	1
1. Kebutuhan Sistem Halal di Masyarakat .....	1
2. Tantangan dalam Pengembangan Sistem Halal di Masyarakat .....	4
KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA .....	9
1. Konstruksi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia.....	9
2. Pengembangan Kebijakan dan Penerimaan Masyarakat .....	16
3. Metodologi Studi Penerimaan Kebijakan Sertifikasi Halal .....	25
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL DAN PENERIMAAN PELAKU UMKM .....	29
1. Hasil Uji Penerimaan Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal....	29
2. Respon Pelaku UMKM Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal.....	43
3. Pertimbangan dalam Penerimaan Kebijakan Sertifikasi Halal .....	48
PENUTUP.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54